

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PELAKSANAAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)**

(Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)

SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Disusun oleh :

MEGA MELATI

NIM 2017/17043019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PELAKSANAAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR)***

(Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)

Nama : Mega Melati
NIM/BP : 17043019/2017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

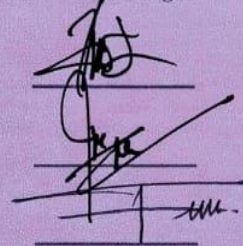
Padang, November 2021

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dian Fitria Handayani, SE., M. Sc.
2. Dr. Erinos NR, M. Si. Ak.
3. Fefri Indra Arza, SE., M. Sc. Ak.



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

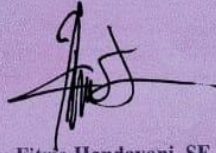
PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PELAKSANAAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)
(Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)

Nama : Mega Melati
NIM/BP : 17043019/2017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2021

Disetujui Oleh :

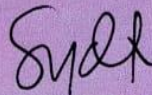
Pembimbing



Dian Fitria Handayani, SE., M. Sc.
NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE., M. Si. Ph. D.
NIP. 19800103 200212 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mega Melati
Nim/Tahun Masuk	: 17043019/2017
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Barulak/28 Desember 1997
Program Studi	: S1 Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jorong Kubu Gadang, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
No. HP	: 085264342329
Judul Skripsi	: Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) (Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis /skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



ABSTRAK

Mega Melati (2017/17043019). Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) (Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)

Dosen Pembimbing : Dian Fitria Handayani, SE., M. Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pengaruh pendapatan daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), (2) Pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), (3) Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam penelitian ini diukur berdasarkan ketersediaan informasi keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini meliputi 130 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data laporan keuangan dan PDRB/pendapatan per kapita diperoleh melalui website resmi BPK dan BPS, sedangkan untuk data IFR diperoleh melalui website masing-masing pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019. Penelitian ini memberikan studi literatur yang komprehensif tentang pengaruh pendapatan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Kata kunci : *Internet Financial Reporting*, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) (Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Ekonomi pada Universitas Negeri Padang. Selesaiannya Penelitian ini, juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Nenek, Ayah, Ibu, serta keluarga besar penulis yang setiap saat memberikan cinta, kasih sayang, do’a dan dukungan terbaiknya kepada penulis, sehingga penulis bisa menikmati setiap proses dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan fasilitas-fasilitas dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE., M. Si. Ph. D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Vita Fitria Sari, SE., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Dian Fitria Handayani, SE., M. Sc. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, tulus, dan selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan motivasi, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, motivasi dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada M. Iqbal, terimakasih telah hadir dan selalu menemani hari-hari penulis, selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, selalu setia mendengar keluh kesah serta selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusanmu dan semoga hubungan kita bisa berlanjut sampai nanti-nanti.
7. Kepada para sohib terbaik, Listiani, Elisa Putri Masni, dan Henny Julia Regina terimakasih banyak telah menjadi sohib selama masa perkuliahan penulis yang bersedia membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga hubungan pertemanan kita terus berlanjut sampai kapanpun.
8. Seluruh teman-teman seangkatan, Keluarga Besar Akuntansi 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sekarang, terimakasih banyak atas waktu, bantuan, dan partisipasinya selama ini dalam penyusunan skripsi penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Padang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
KERANGKA TEORI	14
A. Teori <i>Signalling</i>	14
B. <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	15
C. Pendapatan Daerah.....	22
D. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	23
E. Kualitas Laporan Keuangan	23
G. Hipotesis Penelitian.....	26
H. Kerangka Konseptual	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sampel Penelitian	32
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	35
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	48

C. Pembahasan.....	65
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kriteria pemilihan sampel	33
Tabel 4.1	Hasil analisis statistik deskriptif	49
Tabel 4.2	Hasil uji normalitas	51
Tabel 4.3	Sampel setelah outlier	52
Tabel 4.4	Hasil uji normalitas outlier.....	53
Tabel 4.5	Hasil uji multikolinearitas.....	54
Tabel 4.6	Hasil uji autokorelasi	55
Tabel 4.7	Hasil uji heteroskedastisitas uji gletser	56
Tabel 4.8	Hasil uji heteroskedastisitas uji white	57
Tabel 4.9	Hasil uji analisis regresi berganda	58
Tabel 4.10	Hasil uji analisis koefisien determinasi.....	60
Tabel 4.11	Hasil uji f (simultan)	61
Tabel 4.12	Hasil uji t (partial).....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka konseptual	31
------------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Pendapatan Daerah di Pulau Sumatera	81
Lampiran 2 : Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sumatera	84
Lampiran 3 : Data Kualitas Laporan Keuangan di Pulau Sumatera	88
Lampiran 4 : Data <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR)	91
Lampiran 5 : Data Outlier	94
Lampiran 6 : Hasil Uji Statistik	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin canggih, salah satunya yaitu pemanfaatan internet yang menyajikan berbagai macam informasi. Hal ini diiringi dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Saat ini, internet menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mengingat internet bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, pengaksesan berbagai macam informasi, pengetahuan, edukasi, kemudahan bisnis, serta sebagai sarana hiburan.

Sektor swasta, banyak perusahaan yang sudah memanfaatkan internet sebagai penyampaian informasi akuntansinya atau dikenal dengan *Internet Financial Reporting* (IFR). Perusahaan bersedia menerapkan IFR dilatarbelakangi oleh berbagai macam manfaat yang akan diperoleh, yaitu dengan menggunakan IFR pelaporan keuangan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun (Debreceeny *et al.*, 2002; Marston dan Polei, 2004 dalam Wardani, 2011). Penyebarluasan informasi keuangan melalui internet juga mampu menarik investor serta memberikan image yang positif bagi perusahaan (Ettredge *et al.*, 2001 dalam Wardani, 2011).

Sektor publik, khususnya pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum antusias dalam penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

Pemerintah daerah di Indonesia banyak yang belum memanfaatkan penggunaan internet secara optimal khususnya dalam hal pelaporan keuangan (IFR) (Muhammad, 2012). Publikasi informasi publik di internet khususnya informasi keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik. Publikasi informasi publik di internet juga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses serta memperoleh informasi sehingga bisa mencegah terjadinya *fraud* atau korupsi di sektor publik khususnya pemerintah daerah. Hal ini sekaligus mampu memperluas partisipasi publik, karena masyarakat dimungkinkan terlibat aktif, baik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan oleh pemerintah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, efisiensi birokrasi, serta perbaikan produktivitas.

Internet merupakan sumber berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Hal yang menguntungkan dari internet yaitu tidak mengenal batas wilayah dan waktu. Selain itu, media internet dibandingkan dengan media lainnya yaitu informasi yang diperoleh lebih mudah, murah, dan cepat meskipun dalam jangkauan global. Tren pemanfaatan internet sebagai pengungkapan informasi juga berimbas pada sektor publik terutama pemerintah. Pemerintah sangat menyadari hal tersebut, sehingga pemerintah berupaya menempuh berbagai cara salah satunya dengan menerapkan sistem *electronic government* (e-government) atau pemerintah berbasis elektronik sesuai Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 dan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan yang baik atau

good governance. Adanya sistem ini, membuat sistem pemerintahan tradisional yang identik dengan *paper based administration* atau pengerjaan secara manual yang boros kertas serta waktu mulai ditinggalkan.

Saat ini *e-government* hampir dimiliki oleh semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, terutama semenjak setelah diberlakukannya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP). Berdasarkan undang-undang ini menyatakan bahwa masyarakat sebagai pemohon informasi publik berhak mendapatkan akses untuk informasi publik dari penyelenggara pemerintahan atau badan publik. Penerapan *e-government* membuat informasi publik dapat disampaikan secara lebih efisien, efektif, dan ekonomis (3E).

Pemerintah sebagai badan yang melakukan investasi pada teknologi informasi berupa *e-government* menyadari pentingnya upaya untuk memuaskan kebutuhan akan informasi publik. Hal ini juga akan menimbulkan tanda tanya bagi publik, apakah *e-government* yang diterapkan telah dimaksimalkan pemanfaatan penggunaanya secara baik, tidak hanya pada tataran pemerintah daerah saja, tapi optimalisasinya juga termasuk dalam aspek akuntansi atau keuangan. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia yaitu hanya dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada DPRD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun, untuk penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat hanya bersifat sukarela.

Pemerintah seharusnya dapat menciptakan transparansi terhadap rakyat terutama dalam bidang keuangan. Belum adanya regulasi yang tegas dalam keterbukaan informasi, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pejabat publik untuk bertanggungjawab, transparan, serta lebih mengutamakan pelayanan masyarakat. Keberadaan regulasi tersebut membuat pemerintah daerah harus melaporkan hasil kinerjanya terutama dalam bidang keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi dan tanggungjawab sosial.

Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet atau yang dikenal dengan *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh kepala daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peranan pihak eksternal bagi pemerintah daerah sangat penting dalam hal memberikan pengawasan serta dukungan dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Adanya pengawasan dari DPRD, BPK, masyarakat serta pihak-pihak lainnya mampu mengarahkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang ingin dicapai dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mampu menutup celah setiap penyalahgunaan dan

penyelewengan keuangan publik (*fraud*). Pengawasan terhadap keuangan publik, bukan hanya pengawasan terhadap keuangan serta ketaatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga termasuk pengawasan terhadap keefesienan pemakaian anggaran apakah sudah berdayaguna dan berhasilguna. Syahrudin dan Werry (2002), menyatakan bahwa ada empat institusi yang mengawasi pelaksanaan APBD, yaitu DPRD sebagai legislatif di daerah, SPI (Satuan Pengawasan Internal), pengawasan eksternal, serta terakhir menteri dalam negeri. Adanya lembaga-lembaga pengawas tersebut, menandakan pemerintah berkeinginan untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai azas *Good Governance*.

Penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan perwujudan pelaksanaan *e-government* pada pemerintah daerah. Regulasi terkait penerapan *e-government* sudah diatur oleh Intruksi Presiden No. 03 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yang menegaskan setiap instansi pemerintah yang ada baik di pusat maupun di daerah harus membuat situs webnya masing-masing guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkenalkan potensi daerah yang dimiliki hingga akhirnya terbentuk *good governance*. Pola pelayanan melalui *e-government* dianggap lebih fleksibel dan efisien mengingat pengaksesannya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat. Sejauh ini, penerapan *e-government* melalui IFR belum berjalan optimal, mengingat belum ada sanksi yang diterapkan jika hal tersebut tidak

dilaksanakan sehingga pelaksanaan IFR masih dalam kategori pengungkapan yang bersifat sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Trisnawati dan Achmad (2014) menemukan bahwa belum semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia melakukan publikasi laporan keuangan (IFR) secara lengkap setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan terciptanya perbedaan kualitas serta informasi keuangan antar pemerintah daerah. Bentuk upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan di internet, maka Pemerintah Pusat pada tahun 2012 mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan instruksi tersebut pemerintah daerah diwajibkan agar mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah pada masyarakat di dalam website resminya. Namun, menurut hasil survey pada September 2013 yang telah dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran mengungkapkan bahwa mayoritas pemerintah daerah masih enggan untuk mempublikasi pengelolaan anggarannya pada websiteresmi. Agustin (2014) dalam risetnya mengenai publikasi pengelolaan anggaran pada website Pemerintah Daerah di Sumatera Barat juga menemukan hal serupa, bahwa masih banyak pemda yang belum mewujudkan transparansi.

Martani dan Fitriasaki (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah baru mencapai 15 %. Informasi yang sering kali diungkapkan mengenai keuangan dan kinerja pemda masih dalam bentuk berita. Faktanya untuk pengungkapan informasi keuangan utama serta informasi kinerja dalam bentuk

APBD/anggaran, laporan kinerja, serta laporan keuangan masih dibawah 10%. Penelitian lain menyebutkan bahwa informasi yang paling banyak dilampirkan di website pemda masih berkisar pada profil daerah, perundangan, timeliness, serta kependudukan. Sedangkan informasi mengenai keuangan, tokoh daerah, pembangunan, pelayanan daerah masih belum dijadikan prioritas utama (Puspita dan Martani, 2012). Konten yang berhubungan dengan transparansi keuangan merupakan konten pokok/utama untuk disajikan. Karena konten ini diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku bisnis, industri, serta masyarakat yang terutama sekali. Konten tersebut juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik secara demokratis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintah.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti, melihat adanya kesenjangan antara harapan dari masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fakta yang memperlihatkan bahwa pemda belum sepenuhnya berkomitmen menjalankan amanat dari Undang-Undang No. 14 tahun 2008, untuk mengelola serta menyediakan informasi yang berkualitas agar tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah yang terletak di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, mengingat adanya peningkatan jumlah website yang dimiliki oleh pemda di Pulau Sumatera dibanding tahun sebelumnya. Pulau Sumatera juga termasuk ke dalam salah satu daerah yang

mendominasi kasus korupsi, terpidana korupsi, baik itu pejabat negara, politisi, maupun swasta dengan rentang tahun 2001 hingga 2015 (Ningsih, 2018). Kasus korupsi dapat terjadi ketika transparansi pemda terhadap masyarakat sangat rendah. Penerapan transparansi dapat dilihat melalui wujud pertanggung jawaban pemda pada masyarakat, upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan manajemen yang baik, serta mengurangi kemungkinan akan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Penelitian ini perlu dilakukan di Pulau Sumatera, mengingat Pulau Sumatera yang didominasi oleh kasus korupsi, sehingga diharapkan melalui penelitian ini kasus korupsi tersebut bisa dicegah.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR sudah pernah diteliti oleh riset terdahulu diantaranya yaitu kompetisi politik, rasio pembiayaan utang (*leverage*), ukuran pemda, tipe pemda, kekayaan pemda, pendapatan per kapita serta opini audit. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 3 faktor yang diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR pada pemda, yaitu pendapatan daerah (diukur dengan pendapatan asli daerah), tingkat kesejahteraan masyarakat (diukur dengan PDRB/pendapatan per kapita), kemudian terakhir yaitu kualitas laporan keuangan yang tergambar melalui opini yang diberikan oleh BPK.

Nosihana dan Yaya (2016) mendefinisikan pendapatan daerah sebagai seberapa besar pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangannya yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan daerah yang tinggi dapat tergambar

dari PAD yang tinggi. PAD mampu memperlihatkan bagaimana kinerja pemda dalam mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Sehingga pemerintah daerah akan berusaha menunjukkan kepada stakeholders sebagai signal bahwa telah mengelola pendapatan daerah dengan baik dan benar. Penelitian Rahman, dkk (2013), Lazwad, dkk (2005), serta Sofyani dan Dwirama (2019) menemukan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, artinya pendapatan daerah yang semakin besar akan menggiring pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan di internet. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) serta Hudoyo dan Mahmud (2014), mereka menemukan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambar melalui pendapatan per kapita (Wilopo, 2017). Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang tinggi akan lebih menuntut keterbukaan informasi melalui website resmi pemda. Hal ini diperlukan sebagai pengukuran kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat, karena masyarakat dengan penghasilan diatas rata-rata cenderung lebih respect terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemda dibandingkan dengan daerah yang penghasilan masyarakatnya berada dibawah rata-rata. Adanya control dari masyarakat dapat mengarahkan kepala daerah untuk mengelola sumber daya dengan baik dan sesuai dengan sasarannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil peneltian

Wilopo (2017) serta Hudoyo dan Mahmud (2014) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR. Temuan berbeda diperoleh dari penelitian Hadiananto dan Murtin (2020) dimana pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR pemda.

Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari opini audit yang diberikan oleh BPK. Opini auditor adalah pernyataan atas pemeriksaan terhadap kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan (Sofyani dan Dwirama, 2019). Opini auditor merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan atas penyajian LKPD. Ada beberapa macam opini audit yang diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang paling bagus, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), terakhir yaitu Tidak Memberikan Pendapat (TMP) merupakan opini yang paling buruk dan harus dihindari (Trisnawati dan Achmad, 2014). Berdasarkan hasil riset Sofyani dan Dwirama (2019) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan IFR, namun penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2017) serta Nosihana dan Yaya (2016) menunjukkan hasil berbeda yaitu kualitas laporan keuangan yang diproksikan oleh opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan IFR pemda.

Penelitian terkait pelaporan keuangan di internet pada pemerintah daerah khususnya di Indonesia masih sangat jarang dilakukan (Styles dan

Tennyson, 2007). Untuk itu penelitian terkait isu ini masih harus diteliti kembali guna memperoleh hasil yang lebih akurat, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IFR pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, fenomena yang terjadi, dan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) (Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?
3. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Sumatera ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Sumatera.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah khususnya. Serta, dapat menambah kontribusi dalam memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang mengenai *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti, terutama terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) di pemerintah daerah, sehingga peneliti bisa mempelajari secara mendalam mengenai topik tersebut.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman untuk penelitian selanjutnya terutama untuk topik yang membahas *Internet Financial Reporting* (IFR).

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ataupun bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR).

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi maupun informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan *Internet Financial Reporting* (IFR), sehingga masyarakat akan meningkatkan partisipasinya dalam mengontrol kinerja pemerintah daerah agar terarah ke arah yang sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori *Signalling*

Evans dan Patton (1987) dalam Verawaty (2015), menjelaskan bahwa teori *signalling* pada sektor publik memperlihatkan bagaimana pemerintah berusaha memberikan sinyal positif atau sinyal baik kepada masyarakat terkait kinerja yang dilakukan. Pemerintah yang telah diberi amanat oleh masyarakat harus mampu menciptakan kinerja yang baik serta transparan. Keterbukaan informasi oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi dapat diwujudkan melalui publikasi kinerja pemerintah berupa laporan keuangan di website pemda.

Internet menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh pemda untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya (Sofyani dan Dwirama, 2019). Penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat dipandang sebagai pemberian sinyal positif dari pemerintah atas kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan amanat masyarakat. Penerapan IFR bertujuan agar masyarakat dapat selalu mendukung, mengawasi, serta mengevaluasi pemerintahan yang sedang berjalan, dengan begitu kinerja pemerintah akan berjalan dengan lancar dan baik.

Wilopo (2017), menjelaskan bahwa dalam teori *signalling* pemerintah digambarkan sebagai *agent* dan masyarakat digambarkan sebagai *principals*. Teori ini mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola

pendapatan daerah mampu mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal positif kepada masyarakat melalui peningkatan sistem pengendalian internal, pengungkapan laporan keuangan yang lengkap dan berkualitas.

Publikasi laporan keuangan pemda di internet merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengurangi asimetri informasi dengan masyarakat. Pemda dapat melakukan pelaporan keuangan di internet secara optimal sebagai bentuk pemberian sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan (Puspita dan Martani, 2012). Masyarakat juga dapat dengan cepat dan mudah untuk memperoleh informasi keuangan terkait kinerja pemerintah, sehingga mampu meminimalisir asimetri informasi yang ada. Manfaat lain yang diperoleh pemerintah yaitu pemerintah akan mendapat citra positif dari masyarakat karena telah bekerja secara transparan dan sesuai dengan amanat yang diberikan.

B. *Internet Financial Reporting (IFR)*

1. *Pengertian Internet Financial Reporting (IFR)*

Internet Financial Reporting (IFR) adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas laporan keuangan yang dibuat serta dipublikasikan di internet (Verawaty, 2015). Pengertian laporan keuangan menurut PP No. 24 Tahun 2005 merupakan laporan yang dibuat secara sistematis dan terstruktur terkait dengan segala jenis transaksi yang dilakukan suatu entitas. Tolak ukur dari kinerja

pemerintah daerah atas penggunaan finansial daerah dalam pelaksanaan kegiatan operasional yaitu laporan keuangan yang disajikan untuk publik.

Tujuan umum dari laporan keuangan menurut Afriansyah (2013) yaitu untuk menyediakan informasi berupa realisasi anggaran, arus kas, posisi keuangan, serta kinerja keuangan lainnya dalam suatu entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi serta membuat keputusan terkait pengalokasian sumber daya. Perolehan informasi tersebut tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jenis laporan keuangan pemda ada 7 yaitu, LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Perubahan SAL, Neraca, LO (Laporan Operasional), LAK (Laporan Arus Kas), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), serta CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah rancangan atau gambaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah periode berikutnya. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, Permendagri No. 59 Tahun 2007, dan PP Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, menyatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka seluruh pemerintah daerah yang ada berkewajiban dalam menyajikan serta menyusun laporan keuangan. Rincian aturan penyajian LKPD telah diatur oleh Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 mengenai Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan pemda salah satunya dengan mengungkapkan informasi keuangan melalui internet.

2. Komponen-komponen Dalam *Financial Reporting*

Menurut Bastian (2006), sistem anggaran negara, mekanisme pengelolaan keuangan, sistem pemerintahan sebuah negara, serta sifat dari lembaga sektor publik mampu mempengaruhi bentuk serta penyusunan dari laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi karakteristik dari akuntansi sektor publik. Perbedaan antara laporan keuangan dari sektor swasta dengan sektor publik dapat ditentukan oleh faktor-faktor tersebut.

Wujud sebagai pemenuhan tujuan umum dari laporan keuangan daerah, dan sesuai dengan SPAP (Standar Akuntansi Pemerintah) No. 1, maka berikut komponen-komponen yang harus disajikan dalam satu set laporan keuangan utama atau pokok oleh entitas pelaporan :

a. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

LRA mengungkapkan bahwa ketaatan pemerintah pusat maupun daerah terhadap APBN serta APBD ditunjukkan dengan diungkapkannya kegiatan keuangan secara transparan dan akuntabel. LRA menyajikan ringkasan penggunaan sumber daya ekonomi, sumber, serta pengalokasiannya yang diolah oleh pemerintah daerah/pusat dalam satu periode akuntansi. Unsur-unsur yang harus ada ketika hendak menyajikan laporan realisasi anggaran yaitu seperti

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menyajikan bagaimana posisi keuangan dalam sebuah entitas pelaporan yaitu berhubungan dengan aset, kewajiban, serta ekuitas pada periode waktu tertentu. Neraca menggambarkan kondisi keuangan pada periode sebelumnya secara komparatif seperti pos kas setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan piutang bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, serta ekuitas.

c. LAK (Laporan Arus Kas)

LAK menyajikan informasi terkait dengan sumber, penggunaan, perubahankas setara kas dalam satu periode akuntansi, serta saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan arus kas keluar dikelompokkan berdasarkan aktivitas/kegiatan operasi, investasi, serta pendanaan.

d. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

CALK merupakan daftar terinci, penjelasan, atau analisis terkait dengan pos-pos tertentu yang tersaji pada Laporan Arus Kas, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran. Poin-poin tersebut harus disajikan informasinya dalam CALK yaitu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) serta pengungkapan-pengungkapan lain yang dibutuhkan sebagai

penyajian wajar dari laporan keuangan yang dibuat, contohnya komitmen-komitmen tertentu dan kewajiban kontijensi.

3. Manfaat Penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Perkembangan pelaporan keuangan di internet adalah sebagai bentuk perkembangan praktik akuntansi pengungkapan yang ada meski perkembangan dari praktik tersebut belum didasari oleh standarisasi pengungkapan informasi keuangan di website pemda. Menurut Almilia (2008), informasi yang disajikan di website baik berupa informasi keuangan maupun pencapaian kinerja hanyalah sebuah bentuk pengungkapan bersifat sukarela yang belum diatur oleh badan tertentu di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah daerah juga sudah mulai memanfaatkan internet sebagai penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Media internet, memberikan keuntungan bagi pemda dalam menyampaikan informasi secara tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2009), makin cepat waktu dalam penyajian laporan keuangan, akan berdampak makin baiknya pengambilan keputusan.

Beberapa problem yang sering terjadi yaitu ketika kebutuhan akan informasi meningkat, waktu yang diperlukan dalam menghasilkan berbagai macam informasi tersebut juga meningkat. Senada dengan yang terdapat pada PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan “manfaat dari sebuah laporan keuangan berkurang, ketika laporan keuangan itu tidak tersedia secara tepat waktu. Sebuah perusahaan

dianjurkan untuk menerbitkan laporan keuangan selambat-lambatnya 4 bulan setelah tanggal neraca. Adapun faktor-faktor yang dijadikan alasan seperti kompleksitas operasi perusahaan, hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran dari ketidakmampuan perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan yang tepat waktu”.

Anggaran pemerintah dan laporan keuangan adalah dokumen yang sangat penting artinya bagi stakeholder dalam memberikan informasi berhubungan dengan kegiatan keuangan pemerintah (Wau, 2015). Agar hal tersebut dapat terpenuhi, maka laporan keuangan yang disajikan harus dapat dengan mudah diakses ataupun diperoleh oleh para stakeholder. Menurut Styles dan Tennyson (2007), berpendapat bahwa pemanfaatan internet sebagai media pengungkapan informasi keuangan dan kinerja pemerintah merupakan cara yang sangat *cost effective* dan nyaman dalam menyebarkan informasi untuk stakeholder (pemangku kepentingan). Pemanfaatan internet dalam menyebarkan informasi keuangan pemerintahan pada masyarakat telah menjadi perhatian khusus oleh GFOA (*Governance Finance Officers Association*) di Amerika Serikat. Menurut GFOA, berikut beberapa manfaat yang akan diperoleh pemerintah ketika memanfaatkan internet sebagai media publikasi laporan keuangan yaitu :

- a. Meningkatkan perhatian terhadap dokumen. Pemerintah akan lebih memusatkan perhatiannya pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan segala aktivitas operasional. Sehingga ketelitian

dan kehati-hatian pemerintah sangat dituntut dalam hal ini. Mengingat kemudahan dalam pengaksesan laporan keuangan yang dapat diakses oleh siapa saja, dan jika ada yang mencurigakan tentunya akan berefek pada pemerintah yang bersangkutan.

- b. Kegiatan penganalisisan menjadi lebih mudah dan cepat. Pemanfaatan internet sebagai media publikasi laporan keuangan membuatnya menjadi lebih mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja. Selain itu format laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk elektronik seperti *spread sheet* (kertas kerja) ataupun format elektronik lainnya membuat pengguna menjadi lebih luwes dan mudah dalam menganalisis setiap data keuangan yang ada.
- c. Internet mampu menjangkau siapa saja, dan dimana saja membuat biaya publikasi informasi laporan keuangan pemerintah menjadi lebih murah atau hemat. Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Styles dan Tennyson (2007), menyatakan bahwa publikasi laporan keuangan yang dilakukan melalui internet atau secara elektronik yang mampu menjangkau siapa saja dan dimana saja, namun tidak akan meningkatkan biaya distribusi dan biaya cetak.
- d. Meningkatkan partisipasi serta kontrol dari masyarakat. Informasi keuangan pemerintah yang disajikan di internet membuat para stakeholder terutama masyarakat dalam menilai serta mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah tersebut. Untuk itu pemerintah harus mampu menyajikan berbagai macam dokumen untuk beragam

stakeholder, mengingat para stakeholder bukan hanya dari masyarakat saja.

C. Pendapatan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah diatribusikan untuk menunjang terselenggaranya segala aktivitas pemda. Pendapatan daerah ada yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri, dan ada juga dari dana yang ditransfer oleh pusat untuk daerah. Pendapatan daerah berasal dari potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah, yang kemudian dikelola oleh pemda, dan menghasilkan pendapatan bagi daerah itu. Adapun pendapatan daerah itu berupa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hasil retribusi daerah, serta pajak daerah.

Tingkat pendapatan daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dari kinerja pemerintah. Daerah yang memiliki tingkat pendapatan daerah yang tinggi menandakan kinerja pemerintah yang baik, sedangkan daerah dengan tingkat pendapatan daerah yang rendah menandakan kinerja pemerintah yang buruk atau belum baik. Menurut Nosihana dan Yaya (2016), PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat menggambarkan pendapatan daerah dari suatu daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri. Setyaningrum dan Syafitri (2012), berpendapat bahwa pendapatan asli daerah merupakan total penerimaan dari suatu daerah yang mampu mencerminkan kemandirian daerah tersebut.

D. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Wilopo (2017), tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat level ekonomi tinggi atau berpenghasilan tinggi cenderung menuntut akuntabilitas dan transparansi atas kinerja dari pemerintah. Level ekonomi masyarakatnantinya juga berimbas kepada teknologi yang digunakan. Teknologi yang canggih akan banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki level ekonomi tinggi, sehingga pemerintah dituntut untuk ikut serta memanfaatkan teknologi yang ada dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pemantauan oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sejahtera akan lebih peduli terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga masyarakat dengan pemerintah dapat bergandengan tangan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

E. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan cerminan kesesuaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemda dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Godfrey (2007) , berpendapat bahwa menurut teori signalling laporan keuangan adalah salah satu bentuk sinyal informasi yang diberikan oleh manajemen untuk prinsipal. Pengungkapan laporan keuangan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan begitu manajemen akan mendapat citra positif dari prinsipal.

Kualitas laporan keuangan dapat tercermin melalui opini audit yang diberikan oleh BPK. Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas kinerja pemerintah terutama dalam hal penyajian kualitas laporan keuangan yang diterbitkan. Sofyani dan Dwirama (2019), menyatakan bahwa opini audit merupakan salah satu indikator yang dinilai atas kualitas akuntabilitas keuangan yang dapat ditemukan di dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

F. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Riset-riset terdahulu telah menemukan berbagai variabel yang mempengaruhi penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah, diantaranya penelitian Sofyani dan Dwirama (2019). Penelitian Sofyani dan Dwirama (2019), faktor yang mempengaruhi penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) terdiri atas kompetisi politik, pendapatan daerah, opini audit, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetisi politik, pendapatan daerah, dan opini audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) di pemerintah daerah.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hadiano dan Murtin (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi IFR yang diukur dalam penelitian ini yaitu persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang, pendapatan per kapita, pendapatan daerah, dan opini audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio persaingan politik dan pendapatan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR.

Selanjutnya, debt financing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Terakhir, pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR.

Penelitian Wilopo (2017) juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan melalui website pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diukur pada penelitian ini ada 7 yaitu, PAD, ukuran pemerintah daerah, sistem administrasi pemerintahan yang kompleks, rasio pembiayaan hutang, belanja daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya faktor tingkat kesejahteraan masyarakat satu-satunya faktor yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah, sedangkan faktor yang lain tidak menunjukkan dampak yang signifikan.

Penelitian Nosihana dan Yaya (2016) yang menggunakan sampel 175 Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2014 juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhi IFR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetisi politik dan ukuran pemda berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan di internet. Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa rasio pembiayaan utang (leverage), pendapatan pemda, tipe pemda, dan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap IFR.

Penelitian Hudoyo dan Mahmud (2014) bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah, pendapatan per kapita, dan leverage terhadap

pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Populasi penelitian ini terdiri atas 50 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mendapat predikat WTP dan WTP-DPP pada tahun 2011. Hasil penelitiannya menemukan bahwa hanya pendapatan per kapita yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, sedangkan pendapatan daerah dan leverage tidak memiliki pengaruh.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2013) juga melakukan penelitian serupa. Penelitian Rahman, dkk (2013) terdiri atas 5 variabel independen yang diyakini berpengaruh terhadap IFR. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu *political competition*, *local government size*, *leverage*, *local government wealth*, dan *local government type*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *leverage*, *local government wealth*, dan *political competition* berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet, sedangkan *size* dan *type* tidak memiliki pengaruh.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2013).

1. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari suatu daerah. Menurut Nosihana dan Yaya (2016) pendapatan daerah dapat diproksikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan dari daerah itu

sendiri, sehingga pendapatan daerah dapat dinilai dari besaran PAD yang diperoleh oleh daerah tersebut.

Pemerintah daerah akan berusaha menjalankan amanat masyarakat semaksimal mungkin sehingga mampu memperoleh hasil kinerja yang memuaskan masyarakat. Pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan daerah yang tinggi akan dengan sukarela mempublikasi laporan keuangannya di internet sebagai bentuk pemberian signal positif kepada masyarakat. Namun berbeda dengan pemda yang memperoleh pendapatan yang rendah cenderung enggan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan di internet.

Berdasarkan hasil penelitian Sofyani dan Dwirama (2019) serta Rahman, dkk (2013) menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR). Peningkatan pengungkapan terjadi saat pendapatan yang diperoleh lebih besar sehingga bisa dilakukan pengungkapan. Dapat diprediksi pemda yang memperoleh pendapatan daerah yang tinggi dengan sukarela melakukan pengungkapan di internet, namun pemda dengan pendapatan daerah yang rendah enggan untuk melakukan pengungkapan di internet. Sehingga berdasarkan hal tersebut rumusan hipotesisnya yaitu :

H1 : Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR.

2. Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Tingkat perekonomian suatu daerah akan mempengaruhi pengungkapan keuangan yang dilakukan oleh pemda di daerah tersebut. Tingkat perekonomian juga akan mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat suatu daerah. Perekonomian juga mampu mempengaruhi teknologi yang diadopsi oleh masyarakat setempat. Kesimpulannya, pengungkapan laporan keuangan di internet bisa dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dari penduduk setempat (Hudoyo dan Mahmud, 2014).

Menurut Wilopo (2017), tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat dinilai dari PDRB/pendapatan per kapitanya. Masyarakat dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki kontrol yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat dengan level perekonomian yang tinggi akan memaksimalkan penggunaan internet terutama dalam memperoleh informasi terkait hasil kinerja dan prestasi dari pemerintahannya. Berdasarkan hasil penelitian Hudoyo dan Mahmud (2014) serta Wilopo (2017) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR.

Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

H2 : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR.

3. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting (IFR)*

Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari opini audit yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu daerah. Styles dan Tennyson (2007), menggunakan *GFOA's Certificate of Achievement Program* sebagai pengukuran kualitas laporan keuangannya, jika diadopsi ke Indonesia hal ini sama dengan opini audit yang diberikan BPK. Opini audit yang dikeluarkan BPK ada 5 jenis yaitu, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat).

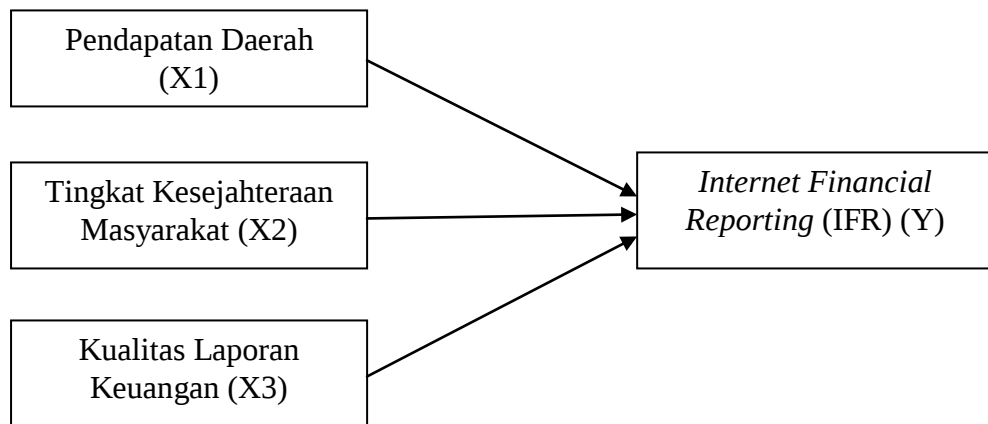
Opini audit yang diberikan BPK akan mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemda. Menurut Trisnawati dan Achmad (2014), pemerintah yang memperoleh opini WTP dengan sukarela melakukan pengungkapan laporan keuangan di internet, sebagai bentuk pemberian signal positif kepada masyarakat atas kinerjanya. Berbeda dengan pemda yang memperoleh opini selain WTP, cenderung akan menghambat akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangannya. Karena merasa takut akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang akan berpengaruh pada jabatannya di periode berikutnya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyani dan Dwirama (2019), yang menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR. Berdasarkan uraian, maka hipotesis pada riset ini yaitu :

H3 : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alur yang memberikan gambaran hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) pada penelitian ini ada 3, yaitu Pendapatan Daerah (X1), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (X2), dan Kualitas Laporan Keuangan (X3). Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam riset ini yaitu *Internet Financial Reporting* (IFR). Kerangka konseptual ini digambarkan melalui skema atau bagan yang sistematis. Kerangka konseptual ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan IFR yang belum optimal di masing-masing pemda yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera. Berikut ini kerangka konseptual yang peneliti sajikan dalam bentuk bagan agar lebih mudah dipahami :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pendapatan daerah yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) akan mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemda. Rendahnya persentase pengaruh variabel pendapatan daerah terhadap pelaksanaan IFR dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetisi politik, tipe pemda, ukuran pemda, dan pembiayaan utang (*leverage*).
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya pendapatan per kapita/PDRB masyarakat suatu daerah tidak akan mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemda. Faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR yaitu masyarakat dengan pendapatan tinggi cenderung tidak peduli atau acuh tak acuh dengan kegiatan pemerintahan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki tekanan yang mengharuskan untuk diterapkannya IFR tersebut.

3. Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya opini audit yang diterima oleh pemda tidak akan mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi keuangan di internet. BPK dalam melakukan proses audit tidak menjadikan pengungkapan IFR sebagai pertimbangan pemberian opini, selain itu pengungkapan IFR masih bersifat pengungkapan sukarela (*Voluntary*), hal inilah yang menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah pada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR, untuk itu pemerintah daerah disarankan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, karena adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan transparansi kinerja terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Tujuannya agar asimetri informasi yang ada pada masyarakat dapat berkurang, disamping itu transparansi mampu mencegah terjadinya korupsi ataupun *fraud*.